



PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA



RENCANA AKSI KINERJA 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang - Kalimantan Timur 75132
Email: informasi@ptun-samarinda.go.id
Website: www.ptun-samarinda.go.id

RENCANA AKSI KINERJA

Rencana Aksi Kinerja adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi kegiatan, waktu pelaksanaan, pendanaan dan keluaran yang ingin dihasilkan yang digunakan sebagai acuan Instansi atau Lembaga dalam pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi Kinerja menghubungkan antara sasaran dan *outcome* yang ada dalam Indikator Kinerja Utama, serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi Kinerja merupakan tahapan-tahapan kinerja yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Pimpinan.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 merupakan panduan dan tahapan pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Profesional, Berintegritas, Modern dan Mandiri, serta Akuntabel.

Samarinda, 16 Februari 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



Dyah Widastuti, S.H., M.H.
NIP. 19770314 200012 2 002

**RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2024**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	75%	75%	75%	75%
		2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	30%	30%	30%	30%
		3. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	85	85	85

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Penyelesaian Perkara TUN selama 5 Bulan sebagaimana SEMA No.2 Tahun 2014)	√	√	√	√	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang selesai sampai dengan minutasasi 2. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan tidak melewati batas waktu 3. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan melewati batas waktu	69.180.000
2	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	√	√	√	√	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang selesai sampai dengan minutasasi 2. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan tidak mengajukan banding dan kasasi 3. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan mengajukan banding dan kasasi	8.800.000

3	Survey Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	√	√	√	√	Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Reponden Penerima Survey Layanan Pengadilan pada tiap triwulan	-
								2. Jumlah Reponden Penerima Survey Layanan Pengadilan yang merasa puas terhadap layanan Pengadilan.	
								3. Jumlah Responden Penerima Survey Layanan Pengadilan yang merasa tidak puas terhadap layanan Pengadilan.	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	85%	85%	85%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu (berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2011)	√	√	√	√	Persentase Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Jumlah Perkara TUN Tingkat Pertama yang telah diputus 2. Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN Tingkat Pertama yang telah diterima para pihak tepat waktu (setelah pembayaran PNBP). 3. Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN Tingkat Pertama yang belum diterima para pihak.	8.800.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%	5%	5%	5%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	25%	50%	75%	85%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	√	√	√	-	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Jumlah Perkara Prodeo yang masuk 2. Jumlah Perkara Prodeo yang telah diselesaikan 3. Jumlah Perkara Prodeo yang belum diselesaikan	510.000,-
2	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Jumlah Masyarakat Golongan Tertentu yang menjadi tolak ukur capaian (96 orang) 2. Jumlah Masyarakat Golongan Tertentu yang menerima layanan bantuan hukum 3. Jumlah Masyarakat yang bukan Golongan Tertentu yang menerima layanan bantuan hukum	32.900.000,-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	5%	5%	5%	5%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang ditindaklanjuti	√	√	√	√	Persentase Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan telah ditindaklanjuti	Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT 2. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi 3. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT yang telah ditindaklanjuti 4. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi yang telah ditindaklanjuti 5. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi yang belum ditindaklanjuti	-

Samarinda, 16 Februari 2024
 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 Ketua,



Dyah Widjastuti, S.H., M.H.
 NIP. 197303142000122002